

PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA BAGI SISWA-SISWI SMA: RELEVANSI DAN URGENSINYA BAGI MASA DEPAN TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

* Urbanus Ura Weruin

Editor: Frangky Selamat

Setara Institute dan *Forum on Indonesian Development* (INFID) baru-baru ini merilis hasil survei terhadap 947 pelajar SMA di lima kota besar di tanah air periode Januari-Maret 2023 dengan *margin of error* 3,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei tersebut menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan, tetapi sekaligus mencemaskan. Menggembirakan karena sebanyak 99,3 persen responden dapat menerima perbedaan keyakinan dan 99,6 persen dapat menerima perbedaan etnis. Selanjutnya 98,5 persen responden menyatakan berempati terhadap kelompok yang berbeda agama. Sampai di situ jelas bahwa kesadaran toleransi beragama di kalangan para pelajar SMA terbilang tinggi.

Tetapi hasil buruk survei yang mencemaskan dan mencengangkan banyak pihak adalah sebanyak 83,3 persen Siswa SMA menganggap Pancasila bukanlah sebuah ideologi negara yang permanen dan dengan demikian bisa diganti dengan ideologi lain di luar Pancasila (CNN Indonesia, 17 Mei 2023). Yang lebih memprihatinkan adalah sebanyak 56,3 persen responden terbuka terhadap penetapan syariat Islam sebagai landasan bernegara. Kemudian, sebanyak 61,1 persen responden menyatakan setuju jika semua siswi di sekolah menggunakan jilbab. Hanya 38,9 persen responden yang menyatakan tidak setuju.

Temuan ini memberikan sedikit penjelasan, mengapa sikap intoleran dan radikal masih bercokol di kalangan masyarakat Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak usia muda benih-benih sikap intoleran dan radikal masih terus hidup. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), aparat keamanan, pemerintah, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pendidik, dan terutama kemendikbud harus memberikan respons yang memadai terhadap benih-benih *mindset* intoleran seperti ini.

Pembiaran

Kemendikbud bukannya berupaya secara sistematis dan terencana untuk mengikis sikap ini melalui penyempurnaan kurikulum, pembinaan tenaga pengajar, dan sosialisasi memadai, melainkan justru “membiarkan” situasi ini terus terjadi tanpa terobosan kebijakan yang berarti. Disebut “membiarkan” karena tidak memberikan sanksi apa pun bagi praktik-praktik intoleran yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Tidak memberikan sanksi sama dengan mengizinkan praktik yang tidak seharusnya ini terus terjadi.

Kemendikbud misalnya, seolah bungkam terhadap adanya kebijakan tentang kewajiban menggunakan jilbab bagi semua siswa yang bersekolah di sekolah negeri tertentu. Pada hal agama dan keyakinan para siswa sangat beragam. Dalam banyak teks pengajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi ditegaskan bahwa sebagai ideologi, Pancasila merupakan kesepakatan para *founding fathers* yang final dan *binding*. Bagaimana mungkin kita dapat membiarkan orang berpikir untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain di luar Pancasila? Maka yang diperlukan adalah membentuk instrumen pengawasan, pembinaan, dan desain respons yang demokratis atas fakta intoleransi yang melekat pada guru, tenaga kependidikan, dan pendidikan bagi para siswa,

Pelajar Pancasila

Beberapa waktu lalu, Kemendikbud merilis Profil Pelajar Pancasila sesuai Visi dan Misi Kemendikbud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat enam ciri utama pelajar Pancasila yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut:

Salah satu ciri utama pelajar Pancasila adalah moderat dalam beragama. Mantan menteri agama RI Lukman Hakim Saifuddin ketika mengkampanyekan dan mensosialisasikan program moderasi beragama mengatakan bahwa moderasi beragama “harus menjadi arus utama dalam membangun Indonesia” dan itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Hatmoko & Mariani, 2022). Program moderasi beragama dianggap semakin mendesak

dan penting untuk diupayakan karena di tengah pluralitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia dalam soal keyakinan, sikap menegaskan keyakinan lain serta pertumbuhan radikalisme atau fundamentalisme pun semakin marak. Pemahaman dan penghayatan keagamaan seperti itu dapat memicu sentimen SARA, sikap intoleran, konflik, serta kehancuran antar anak bangsa sendiri. Tidak jarang, kekerasan atas nama keagamaan pun sering muncul (Hatmoko & Mariani, 2022).

Pendidikan Moderasi Beragama

Setara Institut mengatakan bahwa paling tidak ada lima faktor yang mempengaruhi sikap toleran atau intoleran pada remaja, yaitu pemahaman wawasan kebangsaan, intensitas penggunaan media sosial, aktivitas keseharian, sikap keagamaan, dan kondisi sosial ekonomi. Tetapi dalam riset sebelumnya, Setara Institut menemukan adanya pola penanaman ide-ide intoleransi di kalangan siswa SMA. Antara lain melalui guru, kurikulum, serta pertemuan dengan alumni melalui sistem mentoring keagamaan seperti mengaji yang disertai dialog-dialog bertema keagamaan. Maka penanganan sikap intoleran para siswa terhadap kehidupan beragama perlu menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk meredam kebencian terhadap keyakinan lain, sikap radikal dan intoleran dalam kehidupan beragama dan memupuk toleransi serta solidaritas keagamaan adalah mensosialisasikan sikap moderat dalam beragama di sekolah-sekolah umum. Dalam bulan Februari lalu, kami melakukan PKM di sebuah SMA umum tentang sikap moderat dalam beragama. Dengan menggunakan *problem-based approach* dan metode 6D (*define, discover, dream, design, deliver, dan debrief*), para siswa tidak hanya mampu memahami konsep-konsep dasar terkait dengan moderasi beragama melainkan juga mampu menstimulasi kesadaran dan tekad untuk selalu bersikap moderat dalam beragama.

Dimulai dengan menunjukkan penting dan relevannya bersikap moderat dalam beragama; pengertian moderasi dan moderasi beragama; tujuan dan relevansi pendidikan moderasi beragama; sikap moderat sebagai esensi beragama; tradisi-tradisi moderasi beragama dalam agama-agama di Indonesia; serta sikap-sikap moderat dalam beragama; para siswa mampu memahami dan mendesain kehidupan keagamaannya secara moderat. Kegiatan ini semakin

lengkap ketika para siswa mampu menangkap pesan moral dari link video yang memperlihatkan kritik Cinta Laura tentang kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia (https://www.youtube.com/results?search_query=cinta+laura+moderasi+agama).



Gambar 1. Foto-foto ketika kegiatan PKM Pendidikan Moderasi Beragama berlangsung, Jakarta 3 Februari 2023

Para siswa yang mengikuti pendidikan moderasi beragama tidak saja dapat menjelaskan pengertian ‘moderasi’, ‘moderasi beragama’; prinsip-prinsip pokok beragama secara moderat; contoh-contoh sikap beragama yang moderat dan yang tidak moderat; dan urgensi sikap moderat dalam beragama perlu dikembangkan di Indonesia saat ini; melainkan juga berhasil menggugah kesadaran, motivasi, dan tekad para siswa untuk selalu bersikap moderat dalam beragama.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan setelah PKM Pendidikan Moderasi Beragama, diketahui bahwa 96% dapat menyebutkan sikap-sikap moderat beragama secara lengkap. Ketika diminta untuk menilai apakah sekolah mereka cukup moderat dan toleran dalam beragama, 87% menjawab iya. Ketika diminta tanggapan tentang pandangan Cinta Laura dalam video yang mereka tonton, 99% para siswa setuju dengan pendapat Cinta Laura bahwa di Indonesia masih banyak orang yang bermusuhan hanya karena perbedaan agama. Para siswa pun setuju (97%) bahwa di masa depan mereka akan selalu bersikap moderat dalam beragama.

Hasil kegiatan ini mengkonfirmasi apa yang sudah dilakukan oleh Anwar (2022), Abdilah (2021), Supriyatno (2020) bahwa pendidikan moderasi beragama mencegah radikalisme dan terorisme serta memupuk toleransi beragama. Laporan hasil penelitian Umar Al Faruq dan Dwi Noviani juga menunjukkan bahwa implementasi pendidikan moderasi beragama di SMA mampu membentuk sikap dan perilaku moderat peserta didik (Faruq & Noviani, 2021; Amin ed., 2020).

* Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara